

Beda Data, Lelang Hotel Dibatalkan

YOGYA (KR) - Lelang eksekusi hak tanggungan atas aset properti/hotel milik PT Perwira Abadi Jaya (PAJ) yang berkedudukan di Jalan Letjen Soeprapto 01 Yogya yang sedianya digelar Rabu (15/2), akhirnya dibatalkan oleh Pejabat Fungsional Pelelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

"Dibatalkan karena terdapat perbedaan data sebagaimana bunyi Pasal 39 huruf e Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang," tutur Kepala KPKNL Yogyakarta Kementerian Keuangan Jati Wirawan dalam keterangan pers, Rabu (15/2) siang.

Disebutkan, objek lelang dimaksud berupa dua bidang tanah seluas 4.439 m2 berikut bangunan/hotel dan segala sesuatunya di Ngampilan, Kota Yogyakarta kesemuanya atas nama PT PAJ. "Objek lelang dijual dengan nilai limit



Kuasa Hukum PT PAJ Dr Najib A Gisymar SH MHum hadir di KPKNL Yogyakarta.

Rp 165 miliar dan uang jaminan lelang Rp 41,25 miliar, sudah memenuhi transparansi prosedur telah diumumkan melalui selebaran 17 Januari 2023 dan di media KR, 1 Februari 2023," paparnya. Mengenai nilai limit atas objek lelang tersebut, jelasnya, mengacu ketentuan PMK No 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. "Setiap pelaksanaan lelang dipersyaratkan harus terdapat nilai limit; (Pasal 47 ayat (1).

Kewenangan dan tanggung jawab penetapan nilai limit sepenuhnya berada di pihak penjual (Pasal 47 ayat (2))," ungkapnya.

Ditetapkan oleh penjual berdasarkan laporan hasil penilaian oleh penilai (Pasal 48 ayat (1)). "Batasan nilai limit yang diatur adalah nilai limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi (pasal 51), sehingga penetapan nilai limit

oleh penjual telah memenuhi ketentuan peraturan di atas," ujarnya.

Sementara Kuasa Hukum PT PAJ Dr Najib A Gisymar SH MHum CM CMSE CLA CRA CLL CTL yang hadir di KPKNL Yogyakarta mengatakan, upaya hukum yang ditempuhnya membawa hasil dan mengapresiasi pembatalan lelang, karena data berbeda.

"Dari appraisal independent kami, nilai hotel mencapai Rp 270 miliar dan saat ini juga sedang kita lakukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH)," tegasnya.

Najib menyatakan, pihaknya akan secepatnya berkomunikasi dengan bank BUMN yang mengucurkan kredit, dan optimis bila diberikan kesempatan pihaknya bisa memenuhi kewajiban dengan operasional hotel yang sudah berjalan baik.

"Kita siap mengikuti prosedur untuk bisa mempertahankan aset properti kita," tegasnya. **(Vin)-f**

KUNJUNGI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN

Potensi Kelautan DIY Potensial Dikembangkan



Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Asep Saepulloh bersama Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Imam Pratanadi di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.

MEDAN (KR) - Pengembangan kawasan Selatan masih menjadi bagian dari Visi-Misi Pemda DIY hingga 2027 mendatang. Pemda DIY terus mempersiapkan pengoperasian beberapa pelabuhan perikanan termasuk Pelabuhan Gesing yang diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal bagi daerah.

Untuk mewujudkan hal itu, Pemda DIY bersama Komisi A DPRD DIY mengunjungi Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/2), untuk mempelajari pelabuhan perikanan di wilayah tersebut. Selain mengunjungi Kantor Pemprov Sumatera Utara dan berbincang mengenai Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan, rombongan juga berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang memiliki salah satu standar tertinggi (Kelas A) di Indonesia. "Potensi kelautan DIY

memang cukup signifikan untuk dikembangkan. Apalagi Pemda DIY tengah mengembangkan tiga pelabuhan perikanan pantai. Dengan kunjungan kita ke Sumatera Utara ini menjadi satu hal yang baik apabila kita bisa mendapatkan informasi lebih soal pelabuhan. Tentu akan mengembirakan jika nantinya salah satu pelabuhan kita juga bisa berkembang menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara atau kemudian jadi Pelabuhan Perikanan Samudera," kata Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Imam Pratanadi didampingi Sekretaris Komisi A DPRD DIY Rany Widayati di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Asep Saepulloh mengatakan, melihat letak geografis DIY, ia yakin Pemda DIY mampu mengembangkan

pelabuhan untuk penangkapan ikan terukur. Bahkan pihaknya menyarankan Pemda DIY untuk segera beraudienasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengembangan pelabuhan penangkapan ikan terukur.

"DIY sangat memungkinkan mengambil peran pelabuhan di Selatan Jawa. Sebab selama ini peran pelabuhan di kawasan itu baru mampu dicukupi oleh Cilacap yang memiliki kapasitas representatif dan sudah tidak bisa dikembangkan lebih luas. Karenanya Pemda DIY bisa mengambil peran baru dalam pengembangan pelabuhan kapal-ikan," paparnya.

Menurut Asep, jika Pelabuhan Gesing mampu menyediakan lahan 50 hektare untuk berbagai fasilitas penunjangnya, maka Pemda DIY bisa berperan sama dengan Cilacap dalam mengembangkan pelabuhan. Apalagi di kawasan Pantai Selatan, beragam jenis ikan tersedia, termasuk jenis ikan tuna yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Rany Widayati mengatakan, Pemda DIY perlu mengembangkan infrastruktur pendukung pelabuhan di kawasan Selatan. Di antaranya akses jalan memadai karena selain penyimpanan ikan, arus distribusi juga menjadi kunci utama pelabuhan perikanan. **(Ria)-f**

Bukan

Kini majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Richard Eliezer dengan hukuman satu tahun dan enam bulan. Majelis hakim juga menyatakan, terdakwa layak menyanggah status sebagai JC. Hakim Alimin menjelaskan, untuk menjadi seorang JC, seseorang tidak boleh berstatus sebagai pelaku utama di dalam perkara yang tengah diadili. Dalam persidangan, ia menyatakan, Eliezer bukanlah pelaku utama meskipun dirinya merupakan eksekutor.

Terdakwa, kata majelis hakim, mempunyai peranan sebagai orang yang mengembak korban Yosua. Sedangkan, saksi Ferdy Sambo (merupakan) pencetus ide,

aktor intelektual, perancang, sekaligus juga menembak korban Yosua.

Berdasarkan hal itu, lanjut majelis hakim, saksi Ferdy Sambo dipandang sebagai pelaku utama, meskipun Eliezer memang benar melakukan penembakan terhadap Yosua. "Terdakwa termasuk pelaku, tetapi bukan pelaku utama," papar majelis hakim. Setelah majelis hakim membeber vonis untuk Bharada E, pengunjung yang memadati PN menyambut gembira. Masyarakat, khususnya pendukung dan yang berempati kepada Eliezer, bersuka cita atas vonis tersebut.

Luapan emosi masyarakat tentu saja cukup beralasan mengingat Eliezer meru-

kapan sosok penting dalam membantu aparat penegak hukum menangkap skenario yang disusun Ferdy Sambo, yang diketahui menjadi dalang pembunuhan berencana Brigadir J.

Instansi negara yang cukup berperan dalam perkara terdakwa Eliezer adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka melindungi dan menjaga hak-hak Richard Eliezer sebagai penguak fakta agar tidak dilanggar.

"Kita semua patut bersyukur. Ini artinya (LPSK) membuat sejarah terutama bagi keberadaan *justice collaborator*," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.

(Ful/Obi/Ant)-f

Sambungan hal 1

Hakim

menegakkan keadilan substantif yang memihak kepada suara rakyat daripada keadilan prosedural. Ini adalah kemenangan suara rakyat," kata Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/2).

Ia mengatakan, majelis hakim pimpinan Wahyu Imam Santoso sedang menjalankan tugas dari pimpinan tertingginya, Mahkamah Agung, untuk menggunakan momen peradilan meninggalnya Brigadir J sebagai momen meningkatkan kepercayaan publik pada dunia peradilan.

"Sebagai momen meningkatkan kepercayaan publik pada dunia peradilan setelah ambruk dengan kasus suap dua hakim agung, Dirnyati dan Gazalba serta beberapa pegawai Mahkamah Agung dalam kasus

suap," ujar Sugeng.

Dalam konteks ini, lanjutnya, putusan hukuman mati kepada Ferdy Sambo kentara sebagai upaya yang sama secara politis meningkatkan citra peradilan dengan vonis lebih berat daripada terdakwa lainnya sesuai suara publik.

Terkait dengan Eliezer yang divonis 1,5 tahun, Sugeng mendorong Polri menerima kembali mantan ajudan Ferdy Sambo tersebut untuk kembali bertugas karena akan dapat menaikkan citra Polri di depan publik. "Bharada E dengan vonis 1 tahun 6 bulan dalam praktiknya akan bisa diterima kembali dalam tugas institusi Polri karena putusan pidananya di bawah 2 tahun," jelas Sugeng. Menkopohukum Mahfud MD memben-

taah anggapan, jaksa penuntut umum (JPU) gagal menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Saat ditemui di Kompleks Parlemen Mahfud mengatakan, JPU tidak bisa dianggap gagal dalam menangani kasus hanya karena vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E lebih rendah daripada tuntutan JPU. "Jangan dikira jaksa itu gagal. Itu justru yang dibacakan hakim itu *kan* konstruksi jaksa semua, cara pembuktian dan lain sebagainya. Cuma vonisnya yang beda," jelas Mahfud.

Ia menilai penindakan kasus pembunuhan berencana Yosua oleh polisi, kejaksaan, dan hakim PN Jakarta Selatan berjalan sangat baik. **(Ant)-f**

Sambungan hal 1

Geo-

Panggilan untuk memperindah bumi yang indah (*hamemayu hayuning bawana*) harus merupakan sikap kultural yang terukur secara ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi. Keistimewaan Yogya yang merupakan penguatan tatanan kehidupan kemasyarakatan harus memperhitungkan aspek wadah fisik sistem itu, yaitu bumi di tempat mana kita berpijak.

Penulis mengusulkan pentingnya pengembangan Geo-Keistimewaan sebagai basis keilmuan dan kearifan lokal untuk membangun DIY sekarang dan masa depan. Sebagaimana geosains yang memiliki beragam cabang keilmuan, Geo-Keistimewaan berfokus pada kajian antara lain, pertama Geofilosofi Yogya. LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) belakangan ini membahas isu yang mereka sebut sebagai Geomitologi. Menurut analisis mereka, mitos-mitos lokal seperti legenda Ratu Laut Selatan itu menyimpan pesan sejarah terjadinya gempa dan tsunami di masa silam, yang membuat rakyat ketakutan. Artinya kajian

kultural-historis itu penting karena bisa berkontribusi ilmiah bagi analisis geologi. Namun penulis memilih Geofilosofi sebab kebudayaan Yogya itu lebih dalam dari sekadar folklore remeh-temeh, tetapi visi-visi filosofis sebagaimana terepresentasi dalam ajaran dan nilai luhur. Visi Sri Sultan HB X sekarang pun - Abad Samudera Hindia - sangat geofilosofis.

Kedua, dengan Geo-Keistimewaan maka pembangunan DIY harus berbasis kesiagaan bencana. Fokus pada kebudayaan menjadi dasar argumentasi untuk membangun dimensi budaya bendawi/materi yang *tangible* seperti membangun rumah-rumah penduduk tahan gempa dan tsunami. Sebab menurut catatan Peneliti BMKG Daryono dalam sebuah seminar di UGM 24 Oktober 2009 silam, gempa-gempa di Yogya selalu merusak bangunan. Gempa Yogya pada 1867 merobohkan 327 rumah. Gempa Yogya 1937 merobohkan 2.200 rumah. Tak kurang dari 28 ribu rumah hancur saat Yogya digoncang gempa pada 1943.

Ketiga, pembangunan kesejahteraan - yang merupakan fokus RPJMD DIY 2022-2027 - juga harus memperhitungkan aspek geologis. Sejak lama ada ungkapan *cedhak watu adoh ratu* (dekat batu, jauh dari ratu), yang menggambarkan kesengsaraan, kemiskinan, keterbelakangan penduduk di kawasan pinggir yang secara geologis tidak didukung. Sekarang, banyak penduduk Yogya yang bukan hanya *cedak watu* tetapi *cedhak sesar*. Penduduk Yogya yang dinilai miskin menurut analisis statistik (yang masih *debatable*) bisa benar-benar miskin anakaladiamuk gempa dan tsunami.

Keempat, sebagaimana ditekankan dalam RPJMD DIY 2022-2027 juga, pembangunan DIY harus mengedepankan inovasi teknologi. Dari inovasi teknologi *early warning system*, teknologi konstruksi tahan gempa dan tsunami, hingga teknologi pertanian vertikultur harus kita genjot. Sebagai antisipasi atas gejolak alam yang sering tak terprediksi.

(Penulis adalah pakar Keistimewaan Yogya)-f

Sambungan hal 1

Pemerintah Tak

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri mengonfirmasi bahwa Philip Mark Mehrtens saat ini bersama KKB di Paro Kabupaten Nduga Papua Pegunungan. Namun, Mathius belum bisa memastikan lokasi

tepatnya.

"Kami masih menunggu laporan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat yang diturunkan Bupati Nduga Namia Gwijangge ke Paro," jelasnya. **(Ant/Has)-d**

Pemerintah Setujui

Meski begitu, Mahfud menyampaikan Pemerintah berpendangan bahwa berdasarkan hak dan kewenangan konstitusionalnya, DPR dalam mengajukan usulan revisi UU MK telah melalui prosedur dan persyaratan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah menyetujui usulan tersebut dan menyusun DIM sebagai upaya perbaikan dalam UU

MK.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR RI Habiburokman memaparkan empat materi penting dalam revisi atau perubahan keempat terhadap UU MK.

"Beberapa pokok materi penting dalam perubahan keempat UU MK, antara lain, pertama persyaratan batas usia minimal hakim konstitusi. Kedua, evaluasi

hakim konstitusi," ujarnya.

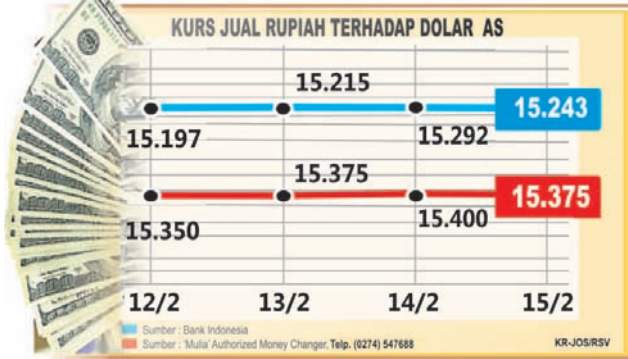
Berikutnya, lanjut Habiburokman, materi ketiga dan keempat yang akan dibahas dalam revisi UU MK itu adalah persoalan mengenai unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan penghapusan ketentuan peralihan masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. **(Ant/Has)-d**

Disepakati ...

Sambungan hal 1

Sementara biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per anggota jemaah sebesar Rp 40.237.937 atau sebesar 44 persen dari BPIH. Angka dan kesimpulan tersebut masih hasil kesepakatan forum raker dan akan diusulkan kepada presiden untuk nantinya diterbitkan dalam bentuk Keppres.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengungkapkan, ada beberapa komponen yang bisa diturunkan biayanya, antara lain konsumsi, akomodasi dan asuransi. **(Ati)-d**



Prakiraan Cuaca				Kamis, 16 Februari 2023		
Lokasi	Cuaca				Suhu C	Kelembaban
	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari		
Bantul					23-31	70-95
Sleman					23-30	75-95
Wates					23-31	70-95
Wonosari					23-30	70-95
Yogyakarta					23-31	70-95
 Cerah  Berawan  Udara Kabur  Hujan Lokal  Hujan Petir						
Grafis : Arko						

Grafis : Arko



Anggun Anindya Sekarnigrum, Mikom Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

MEDIA massa memiliki peran yang penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi serta isu strategis kepada khalayak luas. Media massa berfungsi sebagai perantara atau penghubung bagi masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan tugas menyajikan fakta-fakta yang disebarkan sebagai informasi.

Kekuatan media massa dapat mempengaruhi pemikiran maupun sikap masyarakat seperti halnya dalam membentuk opini. Adanya media massa, membuat masyarakat menge-

tahui berbagai fakta akan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia.

Hal ini diperkuat dengan perkembangan teknologi yang saat ini menjadi tumpuan masyarakat maupun media dalam membagikan informasi secara mudah dan cepat. Perkembangan teknologi di era digital saat ini selain membantu media dalam menyebarkan informasi, akan tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

Saat ini, masyarakat dengan mudah mengakses berita maupun informasi menggunakan internet dengan mudah. Perkembangan ini mengakibatkan media massa juga mengalami pergeseran cara kerjanya. Tanpa mengurangi fungsi dari media massa dan kode etik jurnalistik dalam pembuatan konten informasi, media massa saat ini juga harus mengikuti perubahan yang ada untuk menarik masyarakat dalam menyebarkan informasi.

Konten informasi maupun berita terkini saat ini lebih banyak di akses oleh masyarakat melalui media sosial. Fenomena masyarakat saat ini dimana masyarakat tidak bisa melepaskan diri dari smartphone untuk mengakses internet. Hampir semua orang mempunyai akun media sosial. Media sosial sendiri saat ini sudah banyak berkembang seperti facebook, twitter, instagram, youtube,

tiktok dan masih banyak lagi.

Kemunculan media sosial ini banyak mengalihkan peran media massa dalam menyebarkan informasi. Pemakaian internet yang dapat dengan mudah di akses melalui smartphone membuat kecenderungan masyarakat lebih suka mengakses berita maupun informasi dari media sosialnya daripada media massa secara umum. Kemudahan dan kecepatan dalam mengakses media sosial ini mengakibatkan banyaknya informasi tidak tepat sasaran maupun hoax dan berita negatif.

Mudahnya masyarakat memberikan tanggapan ataupun ikut menyebarkan informasi melalui media sosial menjadi salah satu tantangan bagi media massa. Saat ini siapapun dapat mengambil peran sebagai jurnalis, baik masyarakat biasa maupun akun-akun media sosial di akun media sosial mereka. Bukan hanya pengguna media sosial saja yang terdampak, akan tetapi perusahaan media massa juga menerima akibat buruk dari pemberitaan hoax yang tersebar. Inilah pentingnya peran pers yang merdeka dan profesional sangat dibutuhkan.

Peran media massa mulai tergantikan oleh media sosial dengan beragam inovasi dan penyajian konten. Tidak mau tertinggal jauh, perusahaan media massa kini memiliki akun

resmi di berbagai media sosial. Karakter khalayak di media sosial turut mempengaruhi pegerasan konten berita maupun informasi. Karakter informasi ataupun berita yang diumut berisi hal yang singkat dan padat saja.

Jurnalisme di media sosial pada umumnya mengejar faktor kecepatan dan aktualitas. Namun, dikarenakan kebutuhan bisnis yang diharapkan konten beritanya di baca oleh banyak orang, tak jarang jurnalis mengabaikan prinsip-prinsip jurnalisme. Hal ini terlihat banyak muncul konten clickbait, judul dibuat sensasional demi menarik perhatian pembaca.

Perkembangan teknologi memang menjadi tantangan bagi media massa, dimana masyarakat menuntut kecepatan akses berita di internet. Semua orang bisa bertindak sebagai jurnalis. Kita tidak tahu maksud dan tujuan setiap orang dalam menggunakan media sosial. Berita dan informasi yang muncul di beranda media sosial terkadang tidak muncul dari jurnalis. Kecenderungan penggunaan media sosial membuat pihak tertentu memanfaatkan hal ini demi kepentingan pribadi.

Dalam media sosial pun, pengguna aktif pada umumnya adalah remaja. Mereka terbiasa untuk berkomentar, berbagi dan memberikan kritik terhadap berita maupun informasi yang disampaikan melalui media sosial. Penggunaan

bahasa-bahasa yang tidak tepat dapat memicu terjadinya hoax dan memunculkan hate speech bagi konten yang dirasa tidak sesuai oleh salah satu pihak.

Hal-hal seperti ini mengharuskan media massa lebih peka dan jeli dalam menjalankan fungsinya. Pentingnya jurnalis untuk disiplin dan melakukan verifikasi. Sebagai sarana komunikasi massa, media memiliki peran sebagai komunikator dan juga agent of change dalam lingkungan publik yang dapat mempengaruhi masyarakat melalui informasi yang disampaikan.

Media massa diharapkan tetap menjunjung tinggi sikap netral dengan menjalankan fungsinya secara optimal. Beberapa fungsi media massa yang tetap harus dijunjung tinggi seperti halnya dalam Vivian (1991) yaitu, pertama fungsi informasi. Media memberikan fakta-fakta yang ditingkas sehingga masyarakat mengetahui kebenarannya.

Kedua, fungsi hiburan. Banyaknya kondisi-kondisi yang menimbulkan ketegangan, diharapkan media mengalihkan perhatian sebagai sarana relaksasi dan meredakan ketegangan sosial di masyarakat. ketiga, fungsi persuasi. Media massa memiliki peran penting dalam mengubah keadaan masyarakat, baik ke arah positif, negatif maupun netral. Konten yang



ditampilkan memiliki pengaruh terhadap opini yang akan disampaikan oleh masyarakat, terutama saat ini melalui media sosial.

Keempat, mendorong koheisi sosial. Media massa diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bersatu. Konten yang disampaikan dapat merangsang masyarakat untuk memikirkan bahwa bercera berai bukanlah hal yang baik bagi kehidupan mereka. Media massa harus mampu meliput berita dengan teknik cover both sides atau bahkan all sides sehingga terdapat integrasi informasi yang disampaikan kepada publik.

Sementara ini, kecenderungan penggunaan media sosial membuat berbagai pihak tertentu memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Pers sebagai pilar keempat memiliki banyak tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik di era banyaknya gempuran ber media sosial. Peran pers menjadi ujung tombak dalam memerangi hoax dan integrasi informasi bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Eksistensi media massa dalam memberikan informasi berdasarkan fakta diharapkan bisa membantu mencerdaskan bangsa.***